



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**



**DECRY WILARSYAH  
05951029**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

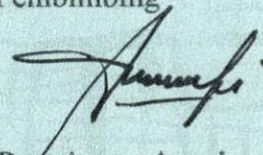
Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : **DECRY WILARSYAH**  
No. BP : 05 951 029  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA  
BUKITTINGGI**

Telah disajikan dan disetujui skripsinya melalui ujian seminar hasil yang diadakan pada tanggal 19 Januari 2011 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 8 Februari 2011

Pembimbing



**Drs. Amra Ausri**  
**NIP.1960100091987021003**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

**Prof. Dr.H.Syafuruddin Karimi, M Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing**

**NIP.130 892 743**

**NIP.130 812 952**



*Anganku Semakin Terjangkau  
Nirwana Yang Gemerlap Menawan Jiwaku  
Indah Serasa Dalam Relung Sukma  
Fitrah Yang Kau Beri Sebuah Rahmat  
Diantara Duka Dan Lara Bersamamu  
Air Mata Yang Berlinang Menjadi Hilang*

*"Ya Allah Ya Tuhanku Tiada Kata Yang Pantas Kuucapkan  
Selain Dzikir KepadaMu  
Tiada Yang Harus Kulakukan Selain Sujud PadaMu  
Ya Allah Semoga Apa Yang Telah Kau Anugerahkan kepadaku  
Dapat Berguna Bagi Agama, Keluarga, Masa Depanmu  
Dan Dapat Menjadikanku Sebagai Orang Selalu Mensyukuri  
Atas Nikmat Yang Telah Kau Berikan.....Amin"*

*Dengan Rasa Syukur Yang Sedalam-Dalamnya...  
Dengan Hati Yang Tulus dan Ikhlas Kucoba Meraih Citaku....  
Semua Hanya Karena Iradah-Nya Hingga Kugapai Kebahagiaan.*

*Karya Ini Kupersembahkan Buat Yang Tercinta  
Papa, Mama, Udaku, serta Adikku  
Sebagai Bakti Ananda Atas Segala Limpahan Do'a Kasih Sayang  
Serta Pengorbanan Tulus Yang Mengantarku  
Pada Titik Akhir dari Satu Perjalanan....*

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, Februari 2011

**DECRY WILARSYAH**  
**05 951 029**

	<b>No.Alumni Universitas</b>	<b>DECRY WILARSYAH</b>	<b>No.Alumni Fakultas</b>
<b>BIODATA</b>			
<p>a). Tempat/Tgl lahir: Lirik/10 Oktober 1987 b). Nama Orang Tua: Darlis dan Yusni Kasim c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No. BP: 05 951 029 f). Tgl Lulus: 19 Januari 2011 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 2,76 i). Lama Studi: 5 tahun 4 bulan j). Alamat Orang Tua: Komp. SMPN 1 Talang Ubi Pendopo Sumatera Selatan.</p>			

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BUKITTINGGI**

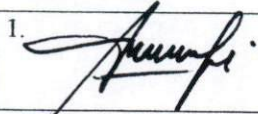
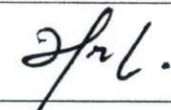
*Skripsi SI Oleh: Decry Wilarsyah*

*Pembimbing: Drs. Amra Ausri*

**Abstrak**

Kota Bukittinggi merupakan kota wisata di Sumatera Barat, yang memiliki aset kekayaan yang besar dan memiliki masyarakat yang sadar akan kewajibannya dalam menunjang pembangunan kota Bukittinggi yaitu dengan membayar pajak bumi dan bangunan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Bukittinggi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, *pertama* faktor wajib pajak, wajib pajak akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan suatu kota tersebut. Kota Bukittinggi merupakan kota yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. *Kedua* faktor Efektifitas pemungutan pajak, yang mengatur hubungan antara hasil pungut pajak dengan potensi pajaknya. Efektifitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. *Ketiga faktor* Efisiensi, yang mana menunjukkan hubungan yang negatif antara realisasi pajak dengan penerimaan di Kota Bukittinggi. Artinya, semakin tinggi efisiensi pajak maka semakin rendah realisasi penerimaan. Dari ketiga faktor diatas, faktor yang paling dominan adalah wajib pajak, kemudian faktor efektifitas pemungutan pajak dan yang terakhir yaitu faktor efisiensi pemungutan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa faktor wajib pajak, efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak merupakan faktor atau variabel yang sangat kuat dalam menentukan penerimaan pajak bumi bangunan di Kota Bukittinggi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 19 Januari 2011. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji:

Tanda Tangan	1. 	2.	3. 
Nama Terang	<b>Drs. Amra Ausri</b>	<b>Sri Maryati, SE. M.Si</b>	<b>Drs. Zulkifli N, M.Si</b>

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi: **Prof.Dr.H.Firwan Tan.SE.M.Ec.DEA.Ing**  
NIP. 130812952

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur hanya bagi kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BUKITTINGGI"** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, serta shalawat dan salam penulis lafaskan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak **Drs. Amra Ausri** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis:

1. Papa, Mama, uda, adikku serta keluarga tersayang selaku orang yang penulis hormati dan sayangi (terima kasih atas semua dukungannya).
2. Bapak Prof.Dr.H.Syafruddin Karimi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

3. Bapak Prof.Dr.H.Firwan Tan, SE, Mec, DEA.Ing selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
4. Ibu Neng Kamarni, SE. M.Si selaku Kepala Program Ekstensi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta kepada staf Biro Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
6. Buat adek ciput tersayang yang selalu setia membantu, menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan IE'05 X10C yang selalu memberikan dukungannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, *Thanks 4 All*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan senang hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak yang membacanya.

Padang, Januari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERSEMBAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Hipotesis.....	7
1.5 Ruang Lingkup.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8

### BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.....	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.1.2 Klasifikasi Pajak.....	12
2.1.1.3 Fungsi Pajak.....	14
2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
2.1.2.1 Pengertian PBB.....	15
2.1.2.2 Sejarah PBB.....	16
2.1.2.3 Subjek Pajak PBB.....	17
2.1.3 Kinerja Administrasi.....	18



2.2	Tinjauan Literatur.....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Data dan Sumber Data.....	23
3.2	Metodologi Penelitian.....	23
3.3	Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	26
3.4	Pengujian Model.....	26
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>		
4.1	Gambaran Umum Kota Bukittinggi.....	29
4.2	Penerimaan PBB Bukittinggi.....	31
4.3	Wajib Pajak Kota Bukittinggi.....	33
4.4	Efektifitas PBB Kota Bukittinggi.....	35
4.5	Efisiensi PBB Kota Bukittinggi.....	36
<b>BAB V PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN</b>		
5.1	Penemuan Empiris.....	40
5.2	Implikasi Kebijakan.....	44
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
6.1	Kesimpulan.....	48
6.2	Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2000-2009.....	30
Tabel 4.2 Perkembangan Penerimaan PBB Kota Bukittinggi Tahun 2000-2009.....	31
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kota Bukittinggi Tahun 2000-2009.....	33
Tabel 4.4 Target, Realisasi dan Efektifitas PBB Kota Bukittinggi Tahun 2000-2009.....	35
Tabel 4.5 Biaya Administrasi PBB Kota Bukittinggi Tahun 2000-2009 .....	37
Tabel 4.6 Tingkat Efisiensi PBB Kota Bukittinggi Tahun 2000-2009 .....	38
Tabel 5.1 Rangkuman Hasil Analisa Regresi.....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian 2000 - 2009

Lampiran 2. Regression

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan umum dan akhir dari usaha pembangunan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dalam kacamata daerah, tujuan pembangunan yang dilakukan di daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sesuai dengan aspirasi penduduk di daerah yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi adalah penting bagi negara-negara yang ada didunia, untuk itulah setiap negara di dunia akan berusaha untuk mengejar pembangunan ekonomi tersebut. Untuk negara berkembang pembangunan itu pada akhirnya akan berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara maju. Selanjutnya pembangunan ekonomi pada dasarnya terjadi apabila terdapat kenaikan produksi dan pendapatan nasional perjiwa rata-rata yang terjadi selama waktu cukup panjang dan dapat memperbaiki taraf hidup rakyat. (Kamaludin:1978; 13)

Pembangunan ekonomi merupakan suatu komponen penting dari pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengusahakan pembangunan tersebut tercapai sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu dapat dinikmati

secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan peralatan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah : (1) menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, (2) mencapai stabilitas perekonomian daerah, (3) membangun basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beraneka ragam. Dari tujuan ekonomi di atas peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan (Jamli 1996:8). Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan kebijakan-kebijakan seperti peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat sebagai hasil dari pembangunan yang dilakukan maka diperlukan ukuran atau indikator. Salah satu indikator kinerja regional yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan pemerintah di daerah dalam menjalankan peranan dan fungsi pemerintah di daerah adalah besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah tersebut.

Salah satu penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri adalah pajak. Pajak merupakan iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1989). Salah satu jenis pajak tertua yang paling banyak ditarik di Indonesia adalah pajak bumi dan bangunan

(PBB) yang pemungutannya diserahkan pada masing-masing daerah Kota/kabupaten (Devas, 1989).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah, yang antara lain dipergunakan untuk menyediakan fasilitas yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (mardiasmo, 2003).

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.56 tahun 2005 tentang dana perimbangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat perimbangan keuangan penerimaan PBB, antara lain: 90% untuk pemerintah daerah yang kemudian dibagi menjadi 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk kabupaten/kota, serta 9% untuk biaya pemungutan. sedangkan untuk pemerintah pusat sebesar 10% yang kemudian dialokasikan kepada seluruh kabupaten/kota guna memantapkan penerimaan daerah, yaitu sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai realisasi penerimaan yang ditetapkan. Realisasi penerimaan yang tercapai dan ditetapkan tersebut berdasarkan variabel - variabel yang berpengaruh terhadap pajak. Seperti wajib pajak, efektifitas pemungutan pajak dan efisiensi pemungutan pajak.

Departemen Keuangan mencatat realisasi penerimaan Negara termasuk hibah hingga 31 Juli 2008 mencapai 56,6% dari total pagu APBN-P 2008. Sementara sampai dengan akhir September 2009, realisasi penerimaan pajak

baru mencapai 66,34% atau Rp432,5 triliun dari target penerimaan pajak dalam APBN-P sebesar Rp528 triliun hingga periode 7 Oktober 2009 (Padangtoday : 2009). Peningkatan realisasi penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh adanya wajib pajak yang makin lama makin membaik. Selain wajib pajak realisasi penerimaan pajak Negara juga dipengaruhi oleh Efektifitas pemungutan pajak. Dengan adanya pemungutan pajak yang lebih terarah dan efektif membuat nyaman bagi wajib pajak. Selain itu realisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh efisiensi. Setelah adanya efektifitas yang terarah dengan baik maka efisiensi pemungutan pajak juga akan membaik.

Di tahun 2006, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Provinsi Sumatera Barat adalah Rp 1.146.120,69, kemudian pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan meningkat Rp 1.236.369,02. Dengan pertumbuhan sebesar 7,87%. Pada tahun 2008 realisasi dan penerimaan pajak bumi dan bangunan efektif meningkat dengan angka Rp 1.657.891,63 dengan pertumbuhan sebesar 34,09%. Meningkatnya realisasi dan penerimaan pajak bumi dan bangunan ini didorong oleh wajib pajak yang semakin sadar akan kewajibannya. (DPKAD Kota Bukittinggi).

Sejalan dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Sumatera Barat, realisasi penerimaan PBB di Bukittingi selama periode 2007-2008 memperlihatkan perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2007 PBB Kota Bukittingi Rp 2.096.082.786 dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan, menjadi Rp. 2.800.393.942 berarti mengalami

peningkatan sebesar 33,6 %.. Kenaikan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan juga diiringi dengan kenaikan jumlah wajib pajak pada periode yang sama. Jumlah wajib pajak Kota Bukittinggi meningkat dari 24.391 pada tahun 2007 menjadi 25.395 pada tahun 2008 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,11 %. (DPKAD Bukittinggi)

Peningkatan penerimaan PBB Kota Bukittinggi juga dipengaruhi oleh kenaikan efektifitas pada periode yang sama. Efektifitas yang baik dan terarah membuat peningkatan yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bukittinggi. Pada tahun 2007 tingkat efektifitas adalah sebesar 103,45%, angka ini naik menjadi 113,33% pada tahun 2008. Ini menunjukkan unit organisasi perpajakan di Kota Bukittinggi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan telah memiliki kemampuan yang baik atau dengan kata lain target penerimaan PBB di Kota Bukittinggi sudah mampu direalisasikan.

Kenaikan juga terjadi pada efisiensi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Pada tahun 2007 efisiensi PBB kota Bukittinggi sebesar 5,58 % dan meningkat menjadi 5,71 % pada tahun 2008 (DPKAD Bukittinggi). Ini menunjukkan hasil penerimaan pajak sudah bisa menutupi biaya pemungutan, artinya dengan biaya yang minimum bisa diperoleh hasil yang optimal.



Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa peningkatan realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi cenderung dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wajib pajak, efektifitas pajak, dan efisiensi pajak pada periode yang sama.

Apakah memang benar peningkatan penerimaan PBB di Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak, efektifitas, dan efisiensi. Penulis tertarik untuk menganalisa dan menjelaskan hal hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BUKITTINGI”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bukittinggi.
2. Bagaimana pengaruh efektivitas terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bukittinggi.
3. Bagaimana pengaruh efesiensi terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bukittinggi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Bagaimana Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi selama periode analisis.
2. Besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.
3. Besarnya pengaruh efektivitas terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.
4. Besarnya pengaruh efisiensi terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

### **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.
2. Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

3. Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Untuk lebih terarahnya pembahasan agar tercapai sasaran yang hendak dituju, maka ruang lingkup pembahasan perlu ditetapkan. Sehingga dalam penulisan penelitian ini penulis akan memberikan batasan dalam tulisan ini yaitu “ Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bukittinggi, dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak, efektivitas pajak dan efisiensi pemungutan pajak. Penelitian ini juga memberikan batasan pengamatan selama periode 2000 s/d 2009 ”.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Membahas mengenai latar belakang masalah yang akan diangkat, kemudian perumusan masalah, manfaat, tujuan dari penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

- **BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan tinjauan literatur.

- **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi uraian atau gambaran secara umum mengenai subyek penelitian yang bersumber pada data yang bersifat umum. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan tentang penelitian.

- **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Berisi gambaran umum variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

- **BAB V : PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Penemuan empiris dan analisa yang meliputi hasil penemuan empiris dan implikasi kebijakan.

- **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan suatu konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara untuk membiayai pembangunan nasional. Seperti halnya sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, kebutuhan keamanan dan fasilitas sosial dan kepentingan umum lainnya yang sebagian besar dibiayai dari pemasukan pajak.

Beberapa definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

- a) Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro. SH,(dalam Subiyakto Indra Kusuma, 1987) memberikan definisi sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung, dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum”.

- b) Menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam Subiyakto Indra Kosuma,1987) memberikan pengertian sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh petugas berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

- c) Menurut Prof.Dr. P.J. Andriani, (dalam Subiyakto Indra Kusuma. 1987), memberikan definisi :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditujuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian diatas adalah :

1. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermamfaat bagi masyarakat luas.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung secara individu oleh pemerintah dengan jumlah pajak yang dibayar.

#### **2.1.1.2 Klasifikasi Pajak**

Setiap pajak mempunyai sifat dan ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan dasar dalam pengklasifikasikannya. Sifat dan ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam satu kelompok (Madiasmo, 2003).

. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut

1. Berdasarkan cara pemungutannya kepada wajib pajak :

##### **A. Pajak Langsung**

Pajak langsung dikenakan dan dipikuli sendiri oleh wajib pajak, dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Pajak ini dipungut secara berkala dan berkohir, contohnya adalah pajak penghasilan. Kohir adalah landasan surat ketetapan pajak yang memuat nama dan alamat wajib pajak, besarnya pajak, tahun pajak dan no ketentuan pajak.

##### **B. Pajak Tak Langsung**

Pajak tak langsung yang dikenakan pda wajib pajak, pemungutannya tidak secara berkala, tidak berkohir dan dapat

dilimpahkan pada pihak lain. Dalam hal ini wajib pajak bukan sebagai pembayar pajak tetapi sebagai sarana pemungut bagi konsumen untuk dibayarkan kepada fiskus. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

## 2. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

### A. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan penyelenggara pemungutnya dikelola oleh Direktur Jendral Pajak, Direktur Jendral Moneter, dan yang dikelola oleh Jendral Bea dan Cukai. Penyelenggara di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah Daerah setempat.

Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

### B. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah Propinsi maupun Pemerintah daerah Kota/Kabupaten, berdasarkan peraturan daerah yang telah disetujui DPR dan dimumkan. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Contohnya



yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Tontonan, Pajak Reklame.

### 3. Berdasarkan Sifatnya

#### A. Pajak Subjektif

Pajak yang pada prinsipnya tidak mengindahkan kondisi wajib pajak, tapi kewajiban pajak orang pribadi dan badan pajak subjektif. Pajak yang dikenakan atas individu berpangkal pada subjeknya, status dan keadaan wajib pajak mempengaruhi besar kecilnya pajak. Jadi ada hubungan antara pemungutan pajak dengan subjek pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Bangsa Asing.

#### B. Pajak Objektif

Pemungutan secara objektif yang dimulai pada saat dipenuhinya sebab-sebab yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak, seperti keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai, selain berbagai pungutan lain yang disebut restribusi.

#### **2.1.1.3 Fungsi Pajak**

- a. Fungsi Budgeter yaitu sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan Negara.

- b. Fungsi Reguler yaitu fungsi pajak untuk mengatur keseimbangan perekonomian dan politik suatu Negara.

## **2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.1.2.1 Pengertian PBB**

PBB adalah iuran masyarakat kepada pemerintah atau Negara akan tanah dan bangunan yang menurut Undang-undang Pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan atau jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pembangunan, bagi yang tidak membayar pajak yang dikenakan sanksi. PBB adalah salah satu jenis pajak tertua dan paling banyak ditarik di Indonesia. Secara umum yang dimaksud dengan PBB adalah pemungutan yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan (Soemitro, 1987).

Bumi adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, atau yang dimaksud perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi jalan raya, jembatan, gedung, pabrik dan sebagainya yang diterapkan secara tetap dan utuh pada tanah dan perairan menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan.

Termasuk pula dalam pengertian bangunan ini adalah jalan lingkungan yang terletak pada suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks

bangunan tersebut, jalan tol, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penyimpanan air dan minyak, saluran pipa dan fasilitas lainnya yang member manfaat.

### **2.1.2.2 Sejarah PBB**

Pada masa penjajahan, pajak yang dikenakan adalah terhadap tanah yang disebut juga “pajak tanah”. Setelah kemerdekaan pajak tanah tersebut ditukar namanya menjadi “pajak bumi”, sesuai dengan amanat GBHN 1983, maka diadakan “tax reform” yaitu pembaharuan dan penyatuan format perUndang-undangan perpajakan. Setelah tax reform maka lahir UU No.12 tahun 1985 tentang PBB dan kemudian diubah menjadi UU No.12 tahun 1994.

Sejak diberlakukan UU No.12 1985 tentang PBB di wilayah Indonesia, maka diputuskan dicabut 7 UU dalam usaha penyederhanaan pemungutan pajak agar tidak terjadi pungutan pajak atas objek menjadi ganda. Jenis pajak yang dicabut adalah pajak rumah tangga, pajak verponding, pajak verponding Indonesia, IPEDA, pajak jalan, dan pajak lain yang dipungut oleh pemerintah daerah yang objeknya berupa harta tidak bergerak. Semua pajak yang dihapus ini kemudian disatukan dan dinamakan PBB. PBB ini lebih praktis karena tidak menyebabkan pembebanan PBB adalah pajak berganda (**Devas, 1989**).

PBB adalah pajak pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 1985 dan diubah menjadi UU No.12 tahun 1994 yang

sebagian hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan didalam APBN dimasukkan kelompok Bagi Hasil Pajak (BHP). Dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan pasal 6 UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali pembagian hasil penerimaan PBB antar pemerintah pusat dan Daerah. Hasil penerimaan PBB dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian sebagai berikut:

- a. 10 % untuk pemerintah pusat dan
- b. 90 % untuk pemerintah daerah yang dibagi lagi menjadi :
  - 1) 16,2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan
  - 2) 64,8 % untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
  - 3) 9 % untuk biaya pemungutan

### **2.1.2.3 Subjek Pajak/Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan memperolah manfaat atas bangunan. Subjek PBB belum tentu merupakan wajib pajak. Subjek pajak baru merupakan wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu mempunyai hak atas objek yang dikenai pajak, memiliki, menguasai atau mendapatkan manfaat atas objek yang

dikenakan pajak, antara lain : pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa (**Muhammad Gade dan Djamaluddin Gade, 1995**).

### 2.1.3 Kinerja Administrasi

Kinerja administrasi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB. Kinerja administrasi adalah prestasi yang dicapai dalam pemungutan PBB. Dalam kinerja Administrasi dapat digunakan 3 pendekatan, (**Devas, 1989**) yaitu :

#### 1. Efektivitas (hasil guna)

Merupakan konsep yang mengatur hubungan antara hasil pungut pajak dengan potensi pajaknya, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutanganya. Jadi efektivitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan unit organisasi perpajakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sehingga dapat dibuat formula sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Potensi penerimaan PBB}} \times 100\%$$

## 2. Efisiensi (daya guna)

Yaitu mengukur bagian hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan. Artinya dengan biaya yang minimum bisa diperoleh hasil yang optimal. Dikatakan efisien jika biaya untuk memungut dapat ditekan serendah mungkin dibanding hasil pemungutannya.

Pengukuran efisiensi menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Total Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Total Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

## 2.2 Tinjauan Literatur

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ratih Kharismasiwi (2004) didalam penelitiannya yang berjudul “*Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten* “. Ditemukan bahwa pengaruh Wajib Pajak terhadap

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang tergolong data time series di ambil dan Kantor Dinas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Klaten, Badan Pusat Statistik Klaten dan beberapa sumber dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Hipotesis dan penelitian ini adalah variabel Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten.

Fanie Oktaliana (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Kepemimpinan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Kelurahan Kota Maksum 3 Kecamatan Medan Kota)*” ditemukan bahwa kepemimpinan seseorang terhadap masyarakatnya akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasilnya masyarakat lah yang dapat memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan. Kepemimpinan Lurah kelurahan Kota Maksum 3 ditemukan cukup baik sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga cukup baik dengan bukti, masyarakat mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, masyarakat mengerti akan tujuan pembayaran pajak bumi dan bangunan, masyarakat berpendapat bahwa tariff pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, masyarakat merasakan kemudahan dan cukup memahami pentingnya fungsi dan mamfaat pajak bumi dan bangunan. Karena pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kota Maksum 3 sebesar

31,47 %. Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder yang diambil dari kantor Dinas pajak dan kantor Lurah daerah tersebut

Selanjutnya Mutia Amana Nastiti (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Daerah ( di Kabupaten Kendal) “ menemukan bahwa jumlah wajib pajak negative dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan daerah yang didapat berdasarkan di uji berdasarkan uji t. Peranan PBB terhadap penerimaan daerah berkisar antara 1,53% - 3,85%. Pada setiap tahun anggaran penerimaan PBB terus mengalami kenaikan, akan tetapi kontribusi yang diberikan masih sangat kecil dan tidak selalu meningkat sehingga belum dapat diandalkan sebagai penerimaan daerah. Pergerakan menurun dalam kontribusi tersebut bukan selalu berarti PBB mengalami penurunan, namun bisa akibat penerimaan PDRB dari sektor lain jauh lebih besar dari PBB, sehingga kontribusi PBB terhadap PDRB menurun.

Hadi Sasana (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*”. Dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan, dan jumlah bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dengan koefisien 0,532, jumlah wajib pajak dengan koefisien 2,231, inflasi dengan koefisien 0,003, jumlah luas lahan dengan koefisien 3,085 dan jumlah bangunan dengan koefisien 3,599.



Sedangkan variabel krisis moneter berpengaruh negatif terhadap penerimaan PBB.

Merlin Faulina A.S (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Periode 2001.01-2005.06 Dengan Menggunakan Pendekatan Kointegrasi dan Error Correction Model*” ditemukan bahwa pengaruh jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bandung, perubahan hasil penerimaan tunggakan PBB, keberatan PBB, pengurangan pembayaran PBB Kota Bandung serta realisasi kebijakan pemerintah adanya penerapan Undang-undang no.25/1999 dan Undang-undang no.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kurun waktu 2001.01-2005.06. Penelitian ini menggunakan pendekatan kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) untuk melihat hubungan antara variabel terikat (hasil penerimaan PBB) dan variabel bebas tersebut diatas dalam jangka panjang dan jangka pendeknya. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas terkecuali PDRB Kota Bandung dan UU No.33/2004 secara signifikan mempunyai hubungan positif dalam mempengaruhi hasil penerimaan PBB dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda tiap variabelnya baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan data time series (data tahunan) dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2009.

Pengumpulan data sekunder terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan penyusunan skripsi ini.
- b. Studi dokumenter, yaitu dengan mempelajari data seperti data realisasi penerimaan PBB, jumlah subjek atau wajib pajak, efektifitas pajak, dan efisiensi pemungutan pajak.

Data sekunder ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi serta Instansi lain yang terkait.

#### 3.2 Metodologi Penelitian

Secara teori besarnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh wajib pajak itu sendiri dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Hubungan tersebut secara matematis dapat dibuat persamaannya, yaitu (**Mardiasmo, 1987**):

$$T = R \times W \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :      T = Penerimaan pajak

R = Tarif pajak

W = wajib pajak

Dalam prakteknya, penerimaan pajak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu :

1. Tingkat tarif pajak yang berlaku
2. Jumlah wajib pajak yang membayar PBB
3. Kinerja Administrasi (diukur dalam efektivitas pajak, efisiensi pemungutan)

Keadaan diatas dapat diubah dalam bentuk fungsi sebagai berikut :

$$T = f ( R, W, KA ) \dots\dots\dots(2)$$

Dimana : T = Penerimaan pajak dalam suatu periode

R = Tingkat tarif

W = jumlah wajib pajak

KA = Kinerja Administrasi

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 variabel bebas dimana PBB dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang membayar PBB, kinerja administrasi yang diukur melalui Efektivitas dan Efisiensi pemungutan PBB. Sedangkan tarif merupakan tarif tunggal yang tetap setiap tahunnya sehingga pengaruh konstan. Hal ini menyebabkan fungsi pada persamaan (2) berubah menjadi :

$$T = f(W, KA_1, KA_2, U) \dots \dots \dots (3)$$

Dimana : T = Penerimaan PBB

W = Jumlah wajib pajak yang membayar PBB

KA<sub>1</sub> = Efektivitas penerimaan PBB

KA<sub>2</sub> = Efisiensi penerimaan PBB

U = Variabel distribusi

Model yang digunakan untuk melihat studi ini adalah model regresi linear berganda. Dengan mengubah T menjadi Y<sub>t</sub>, W menjadi X<sub>1</sub>, KA<sub>1</sub> menjadi X<sub>2</sub>, dan KA<sub>2</sub> menjadi X<sub>3</sub> sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Lains, 1990) :

$$Y_t = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + U_t \dots \dots \dots (4)$$

Dimana : Y<sub>t</sub> = Realisasi Penerimaan Total PBB

b<sub>0</sub> = Konstanta

X<sub>1</sub> = Jumlah wajib pajak yang membayar PBB

X<sub>2</sub> = efektivitas penerimaan PBB

X<sub>3</sub> = Efisiensi penerimaan PBB

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, dan b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi

### 3.3 Variabel dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang dipelajari dalam penelitian ini adalah:

1. Dependent variable atau variable terikat (Y)

Pada penelitian ini yang merupakan variable terikat adalah realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi dari tahun 2000 – 2009.

2. Independent variable (X)

- a. Wajib Pajak (X1) merupakan orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. Efektivitas Pajak (X2) adalah perbandingan Realisasi Penerimaan PBB terhadap target Penerimaan PBB dari data tahun 2000 – 2009.
- c. Efisiensi Pajak (X3) adalah perbandingan total biaya pemungutan PBB terhadap realisasi penerimaan PBB dari data tahun 2000 – 2009.

### 3.4 Pengujian Model

Pengujian model digunakan untuk menguji keberadaan model tersebut. Ada beberapa metode pengujian yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu (J.Supranto. 1981) :

1. Koefisien Determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat dan mengukur kerataan hubungan antara variable bebas dan variable terikat dengan menggunakan rumus :

- a. Secara sederhana

$$R^2 = \frac{\sum x^2}{\sum y^2}$$

- b. Secara berganda dengan menggunakan 3 variabel bebas

$$R^2 = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

2. F- test digunakan untuk menguji keberartian hubungan ketiga variable bebas secara bersamaan terhadap variable terikat, dengan menggunakan rumus :

$$F\text{-test} = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (n - K)}$$

Dimana :  $K$  = Jumlah variable

$n$  = Jumlah tahun pengamatan

3. T-test digunakan untuk melihat apakah masing-masing koefisien yang ditaksir mempunyai hubungan yang berarti. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_1 = \frac{b_1}{\sqrt{\text{Var}b_1}}$$

Dimana :  $t_1$  = nilai hitung (t-hitung)

$b_1$  = parameter yang diuji

Jika t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel berarti terjadi hubungan yang kuat antara masing-masing variable bebas dengan variable terikat.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Gambaran Umum Kota Bukittinggi**

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi pernah dijuluki sebagai kota Fork de Kock, dan dahulunya juga disebut Paris van Sumatera dan kota Bukittinggi dulunya juga pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia.

Kota Bukittinggi adalah kota penguangan yang terletak dikawasan dataran tinggi Agam. Kota ini terkenal dengan panorama alamnya yang indah dan mempesona, sehingga dijuluki sebagai kota wisata. Kota Bukittinggi terdiri dari Kecamatan Guguk Panjang (6.831 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (12.156 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Aur Birugp Tigo Baleh (6.525 Km<sup>2</sup>). Dari ketiga kecamatan tersebut hanya di kecamatan Guguk Panjang terdapat lokasi pasar yang cukup luas yaitu pasar Aur kuning, Pasar Atas, dan Pasar Bawah yang menyebabkan kecamatan ini memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak Bumi dan Bangunan jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya.

Dengan luas daerah sebesar 25.239 Km<sup>2</sup>, kota Bukittinggi tidak memiliki penduduk cukup padat, karena secara rata-rata pertumbuhan penduduknya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 adalah 100.091% per tahun. Untuk melihat perkembangan penduduk lebih jelasnya dapat kita perhatikan tabel 4.1



**Table 4.1 Luas wilayah, jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2000 – 2009**

No	Tahun	Luas (km2)	Jumlah Penduduk
1	2000	25.239	92.768
2	2001	25.239	93.282
3	2002	25.239	94.350
4	2003	25.239	98.551
5	2004	25.239	100.333
6	2005	25.239	101.276
7	2006	25.239	102.224
8	2007	25.239	104.278
9	2008	25.239	106.045
10	2009	25.239	107.805
Rata – rata laju pertumbuhan			1,51 %

Sumber : BPS Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata pertambahan penduduk kota Bukittinggi sebesar 100,09 % setiap tahunnya. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kota Bukittinggi hanya 92.768 orang, kemudian pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Bukittinggi meningkat menjadi 107.805 orang. Secara rata-rata

dari tahun 2000 – 2009 pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 1,51 %.

#### 4.2 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bukittinggi

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber penerimaan daerah Kota/Kabupaten yang cukup potensial untuk dikembangkan. Pajak ini bersifat kebendaan, dalam arti besarnya penerimaannya tergantung pada keadaan dan perkembangan jumlah objeknya yaitu Bumi dan Bangunan. Bangunan ini memiliki tipe – tipe tertentu seperti bangunan permanen, semi permanen, kayu dan lain-lain yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

**Table 4.2 Perkembangan penerimaan PBB Kota Bukittinggi anggaran 2000 – 2009**

T.A	Penerimaan PBB		Pencapaian (%)	Pertumbuhan (%)	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target	Realisasi
2000	378.270.000	563.338.878	148,9	-	-
2001	629.601.000	677.530.060	107,6	66,44	20,27
2002	662.457.000	674.225.449	101,7	5,22	(-0,05)
2003	1.067.905.000	892.520.966	83,5	61,20	32,38
2004	904.400.000	959.144.176	106,05	(-15,31)	7,46
2005	1.150.085.000	957.886.492	84,8	27,16	(-0,13)

2006	1.550.000.000	1.623.185.784	104,72	34,77	69,45
2007	2.026.000.000	2.096.082.786	103,45	30,70	29,13
2008	2.471.000.000	2.800.393.942	113,33	21,96	33,60
2009	2.693.875.000	2.182.349.981	81,01	9,01	(-22,07)
Rata-rata pertumbuhan			17,00 %		

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi (data diolah)

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PBB terus meningkat dari sisi penerimaan. Namun dalam hal pencapaian terhadap target terjadi fluktuasi. Pencapaian paling rendah terjadi pada tahun 2008/2009 sebesar 81,01%. Hal ini disebabkan karena target yang lebih besar pada penerimaan PBB sehingga pencapaian menjadi tidak efektif. Kemudian pencapaian kecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 81,01 % yang mana turun dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena target yang terlalu tinggi mengakibatkan tidak tercapainya seperti yang diinginkan.

Dari table 4.2 dapat dilihat bahwa secara rata-rata selama 10 tahun (2000/01-2009) peningkatan dari target penerimaan PBB kota Bukittinggi mencapai sebesar Rp. 1.353.559.300. sementara itu peningkatan realisasi penerimaan secara rata-rata mencapai sebesar Rp. 1.342.665.851 dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahun mencapai 17.00%. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya kemampuan petugas untuk menyeimbangi antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan PBB.

### 4.3 Wajib Pajak Kota Bukittinggi

Wajib pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Wajib Pajak akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan suatu kota/kabupaten. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan kota Bukittinggi ini tergambar dari semakin meningkatnya pembangunan yang dilakukan sehingga terjadi peningkatan jumlah wajib pajak kota Bukittinggi. Pada tabel 4.3 akan diperlihatkan perkembangan jumlah wajib pajak PBB di tahun 2004 sampai tahun 2009.

**Table 4.3 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kota Bukittinggi 2000-2009**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Pertumbuhan Wajib Pajak (%)
2000	20592	-
2001	20783	0.93
2002	21298	2.48
2003	23123	8.57
2004	23183	0.26
2005	23396	0.92
2006	24183	3.36
2007	24391	0.86

2008	25395	4.11
2009	25921	2.07
Rata-rata pertumbuhan		2.30 %

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi (data diolah)

Berdasarkan table 4.3 diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak. Hal ini terjadi karena semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya membayar pajak, hal ini akan berdampak positive bagi pembangunan kota Bukittinggi itu sendiri.

Tahun 2000 jumlah wajib pajak sebanyak 20.592 orang dan terus meningkat sebanyak 20.783 orang pada tahun 2001. Peningkatan itu terus terjadi hingga pada tahun 2009 jumlah wajib pajak sebanyak 25.921 orang dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,07 %. Bila ditinjau selama tahun 2000 – 2009 kenaikan jumlah wajib pajak tidak terlalu mencolok karena jumlahnya berkisar 1-2%. Peningkatan ini terjadi bisa dikarenakan semakin luas kota Bukittinggi, kemudian adanya pemecahan suatu objek pajak menjadi beberapa objek pajak yang dimiliki oleh beberapa wajib pajak dan terjadinya perkembangan daerah-daerah di Kota Bukittinggi.

Nilai – rata- rata untuk jumlah wajib pajak selama 10 tahun yaitu dari tahun 2000 – 2009 adalah sebanyak 23.227.1 jiwa dengan rata-rata pertumbuhannya 2.30%. Pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,86%, sedangkan pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2008 sebesar 4,11%.

#### 4.4 Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bukittinggi

Analisa efektifitas penerimaan PBB berguna untuk melihat seberapa besar target PBB yang mampu direalisasikan. Dalam mengukur tingkat efektifitas PBB ini kita harus membandingkan antara realisasi penerimaan yang mampu dicapai dengan potensi PBB yang dapat digali.

Apabila kemampuan memaksimalkan realisasi penerimaan PBB mencapai 100% atau mendekati potensi, maka ini mencerminkan bahwa system penerimaan PBB semakin baik dan efektif, sebaliknya apabila kemampuan memaksimalkan realisasi penerimaan PBB relatif belum baik dan tidak efektif. (Devas, 1989)

Untuk melihat tingkat efektifitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan selama 10 tahun (2000-2009) dapat diperlihatkan pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Target, Realisasi dan Efektifitas PBB Kota Bukittinggi 2000-2009**

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)
2000	378.270.000	563.338.878	148.9
2001	629.601.000	677.530.260	107.6
2002	662.457.000	674.225.449	101.7
2003	1.067.905.000	892.520.966	83.5
2004	904.400.000	959.144.176	106.05
2005	1.150.085.000	975.886.492	84,8
2006	1.550.000.000	1.623.185.784	104.72
2007	2.026.000.000	2.096.082.786	103.45

2008	2.471.000.000	2.800.393.942	113.33
2009	2.693.875.000	2.182.349.981	81.01
Rata-rata pertumbuhan			103.5%

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 nilai rata – rata untuk efektifitas pajak selama 10 tahun dari tahun 2000 – 2009 adalah sebesar 103.5% dimana angka ini menunjukkan kemampuan unit organisasi perpajakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sudah baik. Dengan efektifitas terendah sebesar 81,01% dan efektifitas tertinggi adalah sebesar 148.9%.

Rendahnya tingkat efektifitas pada tahun tersebut, karena terlalu tingginya DPKAD menetapkan target. Namun penerimaan PBB secara rill lebih kecil dari potensi yang ada. Dari tabel diatas dapat dilihat dari sudut efektifitas, pada tahun-tahun tertentu menunjukkan angka yang berada diatas 100% dan beberapa mengalami penurunan.

#### **4.5 Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Bukittinggi**

Pada intinya analisa tingkat efisiensi PBB di kota Bukittinggi adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Rp 1 pendapatan dari PBB.

Dimana secara teoritis hal ini dapat dihitung dengan menggunakan formula pada bab II, dengan cara membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemugutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB itu sendiri.

**Table 4.5 biaya Administrasi PBB Kota Bukittinggi tahun 2000-2009**

Tahun	Biaya Rutin (Rp)	Biaya Pembangunan (Rp)	Total Biaya (Rp)
2000	20.517.019	15.255.000	35.772.019
2001	19.613.766	18.802.200	38.415.966
2002	19.536.104	16.400.112	35.936.216
2003	24.808.800	21.691.632	46.500.342
2004	38.720.217	32.640.110	71.360.327
2005	27.595.459	25.200.000	52.795.459
2006	43.556.209	35.330.620	78.886.829
2007	41.670.404	39.448.000	81.118.404
2008	43.980.688	35.550.500	79.531.188
2009	43.600.000	41.400.000	85.000.000
Rata-rata			60.531.675

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi (data diolah)

Kinerja administrasi PBB dikatakan efisien jika biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan semakin kecil atau bahkan lebih kecil dari pendapatan yang dihasilkan.

Biaya yang digunakan dalam pembangunan PBB terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) Biaya Rutin yang merupakan upah perangsang yang difunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemubgutan PBB seperti pihak kelurahan, kecamatan, kolektor ditambah dengan biaya yang dikeluarkan olah Dipenda kota Bukittinggi.
- 2) Biaya Pembangunan yaitu biaya yang digunakan oleh KP.PBB Kota Bukittinggi dalam melakukan pendapatan, penilaian dan kegiatan lainnya. Biaya



Administrasi PBB tersebut merupakan penjumlahan dari biaya rutin dan biaya pembangunan. Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja administrasi PBB kota Bukittinggi dapat dilihat pada table 4.6 dibawah ini.

**Table 4.6 : Tingkat Efisiensi PBB kota Bukittinggi tahun 2000-2009**

Tahun	Total Biaya (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Efisiensi (%)
2000	35.772.019	563.338.878	6,35
2001	38.415.966	677.530.260	5,67
2002	35.936.216	674.225.449	5,33
2003	46.500.342	892.520.966	5,21
2004	71.360.327	959.144.176	7,44
2005	52.795.459	975.886.492	5,41
2006	78.886.829	1.623.185.784	4,86
2007	81.118.404	2.096.082.786	3,87
2008	79.531.188	2.800.393.942	2,84
2009	85.000.000	2.182.349.981	3,89
Rata-rata			5,08 %

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi (data diolah)

Nilai rata – rata untuk efesiensi pajak selama tahun 2000 – 2009 adalah sebesar 5.08 % dengan standar deviasi 0.74. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata- rata menunjukkan biaya untuk memungut pajak sudah dapat ditekan serendah mungkin dibandingkan hasil pemungutan pajak. Nilai efesiensi terendah (dikatakan jelek) terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 7.44% dan nilai efesiensi

tertinggi sebesar 2.84% pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensinya sudah cukup efektif.

Dari hasil data yang diolah diatas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan efisiensi pajak kota Bukittinggi dari tahun ke tahun peningkatannya lebih kecil dari pada peningkatan realisasi pemungutan pajak dikarenakan target pemungutan pajak meningkat setiap tahunnya dan ini menunjukkan efisiensi pemungutan pajak di kota Bukittinggi cukup efisiensi.

## **BAB V**

### **PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

#### **5.1 Penemuan Empiris**

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap hasil pengolahan data empiris yang ditujukan untuk membuktikan hipotesis yang penulis ajukan yaitu untuk membuktikan pengaruh Wajib Pajak, Efektifitas pajak dan Efisiensi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi Sumatera Barat yang diolah dengan bantuan program SPSS.

Berdasarkan hasil pengolahan data lewat bantuan program SPSS dapat dilihat gambaran hasil keseluruhan dari proses pengolahan data, dapat dibentuk persamaan analisis Regresi Berganda ini digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil penelitian ini dapat ditentukan besarnya pengaruh jumlah wajib pajak, efektifitas dan efisiensi terhadap realisasi penerimaan pajak di kota Bukittinggi yang diperlihatkan oleh tabel 5.1 berikut:

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil penelitian ini dapat ditentukan besarnya pengaruh jumlah wajib pajak, efektifitas dan efisiensi terhadap realisasi penerimaan pajak di kota Bukittinggi yang diperlihatkan oleh persamaan regresi berikut:

**Tabel 5.1**

**Rangkuman Hasil Analisa Regresi**

No	Variabel	Koefisien	Nilai $t_{hitung}$	Pvalue	Sig
1	Konstanta	-6100042967	-4.137	.006	
2	Jumlah Wajib Pajak	319908	6.877	.000	Sign
3	Efektifitas	12096763	3.620	.011	Sign
4	Efesiensi	-243350456	-4.169	.006	Sign

Sumber: Data diolah tahun 2010

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = -6.100.042.967 + 319.908X_1 + 12.096.763X_2 + (-243.350.456X_3)$$

$$t_{hitung} = \quad \quad \quad (6.887) \quad \quad \quad (3.620) \quad \quad \quad (-4.169)$$

$$R^2 = 0.969$$

$$F_{hit} = 62.867$$

Dari hasil estimasi diperoleh nilai Rsquare sebesar 0,969 atau 96,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas jumlah wajib pajak,

efektifitas pajak dan efisiensi penerimaan pajak yang ada dalam model tersebut secara bersama –sama dapat menjelaskan variasi variabel penerimaan PBB sebesar 96,9 persen sisanya sebesar 3,1 persen variasi dalam variabel penerimaan PBB dijelaskan oleh variasi variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini. Dari hasil regresi berganda variabel jumlah wajib pajak, efektifitas pajak, dan efisiensi pajak signifikan dan berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi, dimana nilai  $F_{hitung} = 62.867 > F_{tabel} 4.757$  atau signifikan yang diperoleh adalah 0.000 pada  $\alpha = 0.05$  dengan demikian secara bersama-sama jumlah wajib pajak, efektifitas dan efisiensi pajak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi

Dari analisis diatas ditemukan koefisien regresi untuk jumlah wajib pajak sebesar 319.908 menunjukkan bahwa jika nilai efektifitas pajak dan efisiensi pajak tetap dan setiap jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 1 maka akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak di kota Bukittinggi sebesar Rp. 319.908. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang positif antara jumlah wajib pajak dengan realisasi penerimaan pajak, dimana semakin tinggi jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kota Bukittinggi.

Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai thitung lebih besar dari t table ( $6.887 > 2.445$ ).

Selanjutnya hasil analisis koefisien regresi untuk efektifitas pajak sebesar 12.096.763 menunjukkan bahwa jika jumlah wajib pajak dan efisiensi pajak memiliki nilai tetap dan setiap efektifitas pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 1 maka realisasi penerimaan pajak di kota Bukittinggi cenderung naik sebesar Rp. 12.096.763 Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang positif antara efektifitas pajak dengan realisasi penerimaan pajak, artinya setiap efektifitas pajak mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan realisasi penerimaan pajak di kota Bukittinggi.

Efektifitas pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai t-hitung  $>$  t-tabel ( $3.620 > 2.445$ ) dengan signifikansi  $< 0.05$  ( $0.011 < 0.05$ ), Ini menunjukkan unit organisasi perpajakan di Kota Bukittinggi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan telah memiliki kemampuan yang baik atau dengan kata lain target penerimaan PBB di Kota Bukittinggi sudah mampu direalisasikan.

Demikian juga dengan hasil analisa koefisien regresi untuk efisiensi pajak sebesar  $(-243.350.456)$  menunjukkan bahwa jika jumlah wajib pajak dan efektifitas pajak nilainya tetap dan setiap efektifitas pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 1 maka realisasi penerimaan pajak di Kota Bukittinggi menurun sebesar  $(-243.350.456)$ . Koefisien regresi bernilai negatif, menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara efisiensi pajak dengan realisasi penerimaan pajak di kota Bukittinggi. Artinya semakin tinggi efisiensi pajak maka semakin rendah realisasi penerimaan pajak.

Efisiensi pemungutan pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai negative atau nilai t-tabel pada taraf kepercayaan 95 % (signifikansi 5 % atau 0,05) adalah sebesar 2.445, maka  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-4.169 < -2.445$ ) dengan signifikansi  $< 0.05$  ( $0.006 < 0.05$ ), artinya secara parsial, efisiensi pajak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi selama tahun 2000 – 2009.

## 5.2 Implikasi Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Kebijakan ini menuntut kepada daerah untuk dapat mengatur pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Tentunya kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. (Saragih, 2003).

Salah satu indikator kinerja regional yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan pemerintah di daerah dalam menjalankan peranan dan fungsi pemerintah di daerah adalah besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih mencerminkan kemakmuran masyarakatnya, maka dapat dilihat dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Untuk itu perlu dilakukan standarisasi atas Pajak dengan memasukkan faktor jumlah wajib pajak, efektifitas dan tingkat efisiensi pajak di daerah tersebut

sehingga kemudian muncul besaran Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran masyarakat.

Dari hasil penemuan empiris diatas dapat diperoleh bahwa realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh variabel jumlah wajib pajak, efektifitas pajak dan efisiensi pajak. Dari ketiga variabel yang dianalisa, variabel yang paling dominan adalah jumlah wajib pajak dimana pengaruhnya positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi artinya wajib pajak sudah dapat menyadari pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB. Untuk dapat meningkatkan wajib pajak yang tinggi lagi di tahun berikutnya, pemerintah sebaiknya melakukan pendataan yang lebih efisien bagi setiap wajib pajak. Contohnya mendata bangunan - bangunan yang baru didirikan, otomatis wajib pajak semakin bertambah juga.

Variabel kedua yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi adalah efektifitas, secara parsial efektifitas pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Ini menunjukkan unit organisasi perpajakan di Kota Bukittinggi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan telah memiliki kemampuan yang baik atau dengan kata lain target penerimaan PBB di Kota Bukittinggi sudah mampu direalisasikan. Untuk dapat meningkatkan efektifitas pajak pada tahun berikutnya, pemerintah harus terus berusaha meningkatkan kinerja organisasi perpajakan tersebut. Selanjutnya variabel yang ketiga adalah efisiensi pajak, berdasarkan hasil analisa data diatas, diketahui secara parsial efisiensi pajak memiliki memiliki hubungan



yang negatif namun berpengaruh signifikan. Yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan tingkat efisiensi pajak di Kota Bukittinggi akan menurunkan realisasi penerimaan PBB. Hal ini disebabkan tidak efektifnya biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PBB. Maka pemerintah disarankan untuk meminimalkan biaya pemungutan PBB sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB tahun berikutnya.

Dengan melihat hasil temuan empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapatnya pengaruh yang positif untuk variable yang diuji yaitu jumlah wajib pajak dan efektifitas pajak, dan terdapatnya pengaruh yang negatif untuk variabel efisiensi pajak.

Untuk lebih meningkatkan dampak positif Jumlah Wajib Pajak, Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bukittinggi terdapat beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah. Kebijakan itu antara lain :

1. Pemerintah daerah Kota Bukittinggi diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, seperti tempat wisata karena bukittinggi terdapat banyak wisata yang menarik. Kemudian pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan tarif pajak dan retribusi daerahnya harus secara efektif dan efisien.
2. Pemerintahan hendaknya melakukan kebijakan untuk meningkatkan layanan publik yang berkelanjutan, meningkatkan sarana dan prasarana publik, pemerintah hendaknya melakukan kebijakan untuk memperbaiki

investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga peningkatan terhadap pajak bumi dan bangunan pun akan semakin terlihat.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab – bab sebelumnya serta penelitian yang dilakukan terhadap factor – factor yang mempengaruhi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel wajib pajak, efektifitas pajak, dan efisiensi pajak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan PBB di Kota Bukittinggi.
2. Jumlah Wajib Pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Pada umumnya mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir (2000 – 2009) dimana rata – rata sebesar 23.226.5 orang pertahun.
3. Efektifitas pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi, ini menunjukkan sudah efektif walau belum bisa dijadikan acuan karena dalam penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang sebenarnya tapi berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
4. Efisiensi pajak mempunyai hubungan yang negatif tapi signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Ini menunjukkan efisiensi pemungutan PBB belum efisien disebabkan karena setiap tahunnya terjadi peningkatan biaya.

## 6.2 Saran

Dari uraian pada bab – bab sebelumnya dan hasil penemuan empiris serta kesimpulan yang didapat, maka untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bukittinggi hendaknya DPKAD dan KP PBB Kota Bukittinggi, serta pihak – pihak yang terkait hendaknya melakukan usaha – usaha sebagai berikut :

1. Untuk jumlah wajib pajak agar ditingkatkan sistem pendataannya daripada yang telah ditetapkan sekarang, yaitu dengan melakukan pendataan menyeluruh dan berkala minimal 1 kali setahun sehingga dapat diketahui peningkatan jumlah tanah dan bangunan yang dikenai pajak serta peningkatan jumlah wajib pajak.
2. Kemudian untuk efektifitas perlu dilakukan kegiatan evaluasi akhir tahun dengan metode yang baru yaitu, membandingkan realisasi dengan potensi bukan melalui perbandingan target dan realisasi sebagaimana yang diterapkan selama ini.
3. Efisiensi pemungutan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan PBB, maka hendaknya DPKAD dan KP.PBB Kota Bukittinggi hendaknya melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian pengeluaran untuk biaya-biaya yang tidak perlu dapat dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, hamdan. 1993. *Perpajakan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- BPS. Beberapa Tahun Terbitan. *Bukittinggi dalam angka*. Penerbit Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.
- Barata, Atep Adya. 1992. *Pajak Bumi dan Bangunan*, CV.Amigo, Jakarta : CV. Amigo.
- Brotodiharja R, Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Devas, Nick. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta : UI-Press.
- Dipenda. 2002. *Kota Bukittinggi, Sepuluh Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bukittinggi*. Bukittinggi.
- Faulina, Merlin. A S. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Periode 2001.01-2005.06 Dengan Menggunakan Pendekatan Kointegrasi dan Error Correction Model*” Bandung.
- Gade Muhammad, Gade Djamaluddin. 1995. *Hukum Pajak*, Fakultas Ekonomi/Universitas Indonesia.
- Lubis Irwansyah, SE.,M.Si. juni 2009. *Buku Manajemen Dan Analisis Memudahkan Urusan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 266 hal.

- Judisseno, Rimsky.K. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta : PT. Gramedia.
- Kantor Pelayanan PBB Bukittinggi.2002. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bukittinggi.
- Kharismasiswi, Ratih. 2004. *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten*. Klaten.
- Kusuma, Subyakto Indra. 1987.*Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Lains, Alfian, Ekonometrika. 1994. *Teori dan Aplikasi*, Universitas Andalas. Padang.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi 4. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo. 1987. *Perpajakan*, Edisi 3. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nastiti, Amana, M. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Daerah (di Kabupaten Kendal)*. Kendal.
- Oktahan, Fanie. 2009. *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kelurahan Kota Maksum 3 Kecamatan Medan Kota)*". Medan.
- Ramansyah, Amin. 2004. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Magister Ekonomi Pembangunan. Medan.

Rayendra L. Toruan. Des 2009. *manajemen dan analisis : memudahkan pajak*”

PT. Elex Media Komputindo (Gramedia Group), 394 hal..

Sasana, Hadi. 2002. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan*

*Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas).*

Banyumas.

Soemitro, Rochmat. 1947. *Pajak dan Pemangunan*, Bandung : PT. Eraco. 1974

Supranto, J. 1981. *metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan*, PT.

Gramedia, Jakarta : PT. Gramedia.

Undang-Undang No. 12 tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

# LAMPIRAN



**TABULASI DATA PENELITIAN**  
**2000 – 2009**

<b>Tahun</b>	<b>Y</b>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>
2000	563.338.878	20592	148.9	6,35
2001	677.530.060	20783	107.6	5,67
2002	674.225.449	21298	101.7	5,33
2003	892.520.966	23123	83.5	5,21
2004	959.144.176	23183	106.05	7,44
2005	975.886.492	23396	84.8	5,41
2006	1.623.185.784	24183	104.72	4,86
2007	2.096.082.786	24391	103.45	3,87
2008	2.800.393.942	25395	113.33	2,84
2009	2182.349.981	25921	81.01	3,89

## Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Efisiensi, Efektifitas, Wajib pajak(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Realisasi

### Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984(a)	.969	.954	167459601.40386

a Predictors: (Constant), Efisiensi, Efektifitas, Wajib pajak

b Dependent Variable: Realisasi

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	528889527 403213000 0.000	3	17629650913 44045000.000	62.867	.000(a)
	Residual	168256308 614041700 .000		6		
	Total	545715158 264617000 0.000	9			

a Predictors: (Constant), Efisiensi, Efektifitas, Wajib pajak

b Dependent Variable: Realisasi

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	- 6100042967.2 60	1474625477.7 39		-4.137	.006
	Wajib pajak	319908.081	46515.395	.761	6.877	.000
	Efektifitas	12096763.189	3341510.918	.304	3.620	.011
	Efisiensi	- 243350456.31 8	58372154.991	-.412	-4.169	.006

a Dependent Variable: Realisasi